FUNGSI KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Oleh : Sherly Adam

Email : sherly.adam1909@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

ABSTRACT

The disclosure of a criminal case, especially the criminal act of pembunuhan very difficult, at least there are three things that can not be separated because it involves the validity or validity of a court decision, namely: a system of evidence embraced by procedural law, evidence and strength of evidence and evidence that will Strengthening the evidence presented in court. The function of expert information in the proving of murder offenses as evidence in the criminal justice process is required from the examination of the case both in the investigation process and in the court hearing is very important and necessary, especially to assist the investigator, prosecutor or judge in disclosing a case A very complex, complex assassination.

Keyword: Evidence, Murder

A. Pendahuluan

Pada prinsipnya hukum acara pidana adalah kaidah-kaidah yang mengatur tata cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil baik yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP.¹

van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut :²

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh Hakim;
3. Pelaksanaan keputusan.

Fungsi dan tugas utama dari hukum acara pidana adalah sebagai hukum formil sehingga akan mendapatkan kebenaran materiil, didalam mencapai

¹Sudarsono. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. hal 277.

²J.M. van Bemmelen, 2018, "*Strafvordering, Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht.*" S-Gravenhage : Martinus Nijhoft ", hal 1

kebenaran yang materiil tersebut hukum acara pidana dibantu dengan suatu metode pembuktian atau hukum pembuktian. Perkembangan teknologi pada saat ini memunculkan berbagai media komunikasi yang sangat cepat dalam memberikan berbagai informasi dalam ruang dan waktu yang sangat singkat.

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.³

Peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan bahwa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh Hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya telah melakukan kejahatan bisa diputuskan bebas oleh pengadilan. Dengan demikian, untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat diharapkan, baik dalam kasus pidana maupun dalam kasus perdata.

Salah satu permasalahan yang dihadapi penegak hukum untuk menjerat pelaku adalah masalah pembuktian tentang kesalahan terdakwa. Kenyataan tersebut menjadi suatu tantangan bagi kalangan hukum yang harus diterima untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Untuk itu dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa, kehadiran dan keterangan ahli sangat diperlukan. Keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk memberikan pendapatnya berdasarkan keahlian yang

³Munir Fuady, 2018, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya, Bandung. hal 1.

dimilikinya untuk dapat membuktikan bahkan menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi. Dalam penulisan ini penulis ingin mengkaji fungsi keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.

Dalam penegakan hukum haruslah didasarkan pada hati nurani, dengan hati nurani kita bisa menilai apakah tindakan kita sudah manusiawi, adil, patut dan jujur.⁴ Adapun keempat kegiatan pokok dalam rangka proses penyidikan tindak pidana pembunuhan meliputi: penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Keempat kegiatan pokok proses penyidikan pembunuhan maka hasilnya harus memenuhi persyaratan formil yaitu menyangkut format administrasi penyidikan dan persyaratan material yaitu yang menyangkut substansi hukum (unsur-unsur pasal yang disangkakan). Pasal 338-Pasal 342 KUHAP yang kedua-duanya harus terpenuhi. Disamping dalam rangka mendukung pembuktian seperti yang diuraikan, maka penyidik harus dibantu oleh dukungan bagian ilmu kedokteran Forensik dalam rangka Polri mencapai hasil penyidikan yang lebih profesional dan ilmiah serta juga dalam menciptakan *criminalistik mindetnes*.⁵

Kenyataan tersebut menjadi suatu tantangan bagi kalangan hukum yang harus diterima untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Untuk itu dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa kehadiran dan keterangan ahli sangat diperlukan. Keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk memberikan pendapatnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya untuk dapat membuktikan bahkan menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan yang terjadi.

B. Pembahasan

Dalam pengungkapan suatu perkara pidana, paling tidak ada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan karena menyangkut keabsahan atau kevalidan suatu putusan pengadilan, yaitu : sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara, alat

⁴Nyoman Serikat Putra Jaya, *Penegakan Hukum Dalam Era Repormasi* di Sampaikan pada rapat senat terbuka Universitas Pekalongan dalam rangka Dies Natalis XVI dan wisuda sarjana XII 5 september 1998. Pengajar pada Fakultas Hukum UNDIP.

⁵Kepolisian Negara Republik indonesia, *Simposium Penyelidikan Ilmiah Medis dalam Penegakan Hukum*, HUT Fakultas Kedokteran UGM ke 58, Jogjakarta 6 maret 2004

bukti dan kekuatan pembuktian serta barang bukti yang akan memperkuat alat bukti yang dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Sehingga membuktikan berarti memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat sentral.⁶

Hukum pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya. Dengan kata lain pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh para Jaksa Penuntut Umum yang kegunaannya untuk memperoleh kebenaran sejati materiil.

Pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum, namun perlu diketahui bahwa tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang didalamnya berisikan suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan dalam masyarakat, dengan demikian terhadap peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut di mulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan dan seterusnya.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. Kepadanya akan

⁶Edmund Makarim, 2019, *Kompilasi Hukum Telematika*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hal 419.

dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.⁷

Proses pembuktian hakikatnya lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada Hakim tentang kejadian tersebut sehingga Hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan Hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :⁸

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan;
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Pembuktian merupakan proses yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Untuk pembuktian bahwa seorang terdakwa telah melakukan tindak pidana harus melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang “Kekuasaan Kehakiman”, secara tegas menyebutkan bahwa :

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung-jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

⁷ Mohammad Taufik Makarao & Suhasril, 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 103.

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 2019, *Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung :CV. Mandar Maju, hal 99.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian yang terjadi dalam sidang pengadilan.

Menurut van Bemellen membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebab demikian halnya. Senada dengan hal tersebut Martiman Prodjohamidjojo⁹ mengemukakan pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap peristiwa tersebut.

Pembuktian tersebut dilakukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan melakukan pembuktian sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa, pembuktian ini berkaitan dengan alat bukti yang diperoleh pada perkara pidana.

Sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP terdapat dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau sistem pembuktian negatif. Dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dua alat bukti yang sah tersebut maka Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Meskipun dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila Hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa tersebut akan dibebaskan.

⁹Harry Sasangka dan Lily Rosita, 2018, “*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*”, Mandar Maju, Bandung, hal 11.

Sistem pembuktian di Indonesia yang dipertahankan sekarang oleh KUHAP, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah bahwa sistem pembuktian berdasarkan dua alasan yaitu pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah Hakim terpaksa memidana orang sedangkan Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Dan kedua adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat Hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh Hakim dalam melakukan peradilan.¹⁰

Tindak pidana yang terdapat dalam Buku II KUHP merupakan rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan adalah nyawa.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu : (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa ialah :

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), adalah kejahatan yang dimuat dalam pasal 338 s/d 350 KUHP;
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja, dimuat dalam pasal 351 KUHP.

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja di bedakan dalam 3 macam, yakni :¹¹

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP;

¹⁰*Ibid*, hal 257.

¹¹Lamintang, *.Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung: Binacipta, 2019. hal. 45.

2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP;
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari :

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok dimuat dalam pasal 338 yang rumusannya adalah :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun”

Sebagian pakar mempergunakan istilah merampas jiwa orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain. Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339, yang berbunyi :

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindari diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.

Perbedaan dengan pembunuhan pada pasal 338 ialah diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan lain. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti dengan kejahatan lain, jadi pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.¹²

¹² Leden Marpaung, 2018, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 22

3. Pembunuhan berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.¹³

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.¹⁴

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana, direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga

¹³Moeljanto, 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta.

¹⁴Sianturi S. R, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, 1983, Alumni AHMPHTM. Jakarta.

seseorang akan melakukan apapun untuk mempersiapkan pelaksanaannya agar niatnya tersebut tercapai atau terpenuhi keinginan yang timbul dalam pikirannya.¹⁵

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu pembunuhan.

Mengungkap suatu kasus pembunuhan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana

¹⁵H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2019.hal 12

perkosaan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban pembunuhan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana pembunuhan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya .

Fungsi keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana diperlukan mulai dari proses pemeriksaan perkara, baik pada tahap pemeriksaan penyidikan maupun pada pemeriksaan disidang pengadilan sangat penting dan dibutuhkan, terutama untuk membantu penyidik, penuntut umum ataupun hakim dalam mengungkapkan suatu kasus pembunuhan yang sangat rumit, kompleks yang bersifat spesifik. Bantuan ahli sudah dibutuhkan sejak awal pemeriksaan penyidikan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim pada saat pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk memberikan pendapatnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya untuk dapat membuktikan bahkan menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) bahkan memberikan perhatian utama terhadap perlindungan “jiwa” dan “badan” dengan memberikan ancaman hukuman yang lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana lainnya. Maka dalam hal ini kedudukan seorang ahli sangat diperlukan dalam penanganan korban kejahatan, dimana dalam hal ini adalah bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran faktual yang berhubungan dengan kejahatan. Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan *visum et repertum* dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya

satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan pemberitaan dari *visum et repertum* itu harus yang sesungguhnya-sesungguhnya dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada waktu pemeriksaan.

Upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang menyangkut tubuh manusia sebagai barang bukti, hukum tidak dapat menyidangkan perkara tersebut hanya dengan pengetahuannya dibidang hukum saja. Oleh karena itu hakim memerlukan bantuan seseorang yang mempunyai pengetahuan dibidang tubuh manusia, dalam hal ini adalah seorang dokter. Seperti disebutkan pada pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Seorang dokter, baik ahli kedokteran kehakiman maupun bukan ahli kedokteran kehakiman dengan pengetahuan khususnya dimintakan untuk membuat terang suatu perkara. Bagi seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang membuat terang suatu perkara pidana disebut saksi ahli. Ini berarti bahwa dokter juga termasuk pula sebagai saksi ahli. Saksi ahli yang dipanggil dalam sidang pengadilan wajib datang untuk memberi keterangan tentang keahliannya demi keadilan (Pasal 179 ayat (1) KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan saksi ahli adalah :

- a. Ahli Kedokteran Kehakiman
- b. Dokter
- c. Ahli lain

Memang di dalam peraturan perundang-undangan (KUHP dan KUHAP) tidak menyebutkan secara tegas dokter wajib memberikan bantuannya dalam proses peradilan, apabila diminta. Akan tetapi apabila kita berpedoman pada pasal 224 KUHP, maka kesan tidak wajib tersebut menjadi wajib, dokter wajib memberikan bantuannya apabila diminta. Disamping itu juga, perlu diketahui bahwa dokter adalah pegawai negeri yang berkewajiban untuk mengabdikan kepada

kepentingan masyarakat dan Negara dalam pengertian yang sangat luas, sehingga penolakan terhadap kewajiban itu berarti melanggar undang-undang.

Sedangkan di dalam Pasal 184 KUHAP yang dijelaskan bahwa alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, apabila kita melihat di dalam KUHAP ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang saksi ahli diantaranya yaitu :

Pasal 1 butir (28)

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Pasal 120 ayat (1)

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Pasal 133 ayat (1)

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Pasal 179 ayat (1)

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Dapat dijelaskan bahwa saksi ahli adalah seorang dokter, baik itu dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman ataupun ahli lainnya, di dalam penjelasan Pasal 133 KUHAP disebutkan, bahwa yang dapat memberi keterangan ahli adalah ahli ilmu kedokteran kehakiman, sehingga dengan demikian, jelaslah bahwa menurut Pasal 133 KUHAP bahwa dokter umum bukan termasuk dari bagian saksi ahli namun hanya sebatas memberikan keterangan. Namun apabila diteliti lagi mengenai bunyi Pasal 133 KUHAP yang jelas-jelas menyatakan bahwa penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, dokter dan atau ahli lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa bunyi Pasal 133 KUHAP tidak sejalan dengan penjelasannya. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa suatu bunyi pasal tertentu yang tidak sejalan dengan penjelasannya, maka bunyi pasal yang sudah jelaslah yang dianut terhadap maksud si pembuat undang-undang (penjelasannya). Sementara itu, untuk masalah permintaan bantuan seorang saksi ahli hanya dapat diajukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis bantuan atau pemeriksaan yang dikehendaki. Misalnya, terjadi kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka dengan demikian permintaan bantuan terhadap saksi ahli dalam hal ini saksi ahli forensik harus diperjelas. Maksud diperjelas adalah sebatas bantuan apa yang diperlukan untuk sebagai barang bukti tertulis atau lisan, apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ahli forensik hanya sebatas pemeriksaan luar (pemeriksaan fisik) atau pemeriksaan luar dan dalam (autopsi). Keterangan saksi ahli yang dapat disebut sebagai alat bukti yang sah dalam Pengadilan dapat berupa:

1. Secara Tertulis (*visum et repertum*)
2. Secara Lisan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa saksi ahli mempunyai fungsi yang penting dalam proses peradilan, baik itu dalam masa penyidikan sampai dengan adanya putusan yang divoniskan Hakim dalam suatu Pengadilan. Dalam proses pembuktian persidangan, keterangan saksi ahli dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu antara lain: Sebagai alat bukti yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu surat dan keterangan ahli.

- a. Sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti;
- b. Sebagai keterangan yang hanya menguatkan keyakinan Hakim;
- c. Sebagai keterangan yang tidak berfungsi apa-apa.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyebutkan:

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Penjelasan pasal 133 ayat (2) menyebutkan:

“Keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan” .

Pasal 187 huruf c menyebutkan bahwa salah satu alat bukti surat adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikelompokkan 2 (dua) bentuk alat bukti yang berasal dari keterangan ahli, yaitu:

1. Alat bukti surat (*visum et repertum*);
2. Alat bukti keterangan ahli.

Penjelasan di atas sekaligus membuktikan bahwa istilah “saksi ahli” yang sering digunakan dalam proses peradilan, sebenarnya tidak tepat, karena untuk menjadi alat bukti keterangan saksi, seorang ahli tidak memenuhi kriteria seorang saksi seperti yang diatur pada pasal 1 angka 26 KUHP.

Dalam perkara pidana, secara formil kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak mengikat hakim. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada keterangan ahli. Namun, dalam perkara dugaan malpraktik medik, keterangan ahli mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena dari keterangan yang diberikannya dapat ditentukan apakah dokter telah melakukan kewajiban dengan benar atau tidak. Untuk itu, secara materiil seharusnya keterangan ahli dalam perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Demikian juga keterangan seorang ahli yang menjadi alat bukti surat (*visum et repertum*). Apalagi dalam pasal 188 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa surat merupakan sumber petunjuk, yang mana pada gilirannya, sesuai dengan pasal 184 ayat (1) huruf d, petunjuk adalah salah satu alat bukti yang sah, sehingga secara materiil seharusnya alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Dengan demikian *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan). Hal ini berbeda dengan kedudukan keterangan ahli yang disampaikan secara lisan (alat bukti keterangan ahli) dengan keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk surat (sebagai alat bukti surat) di pengadilan pidana. Dalam konteks *visum et repertum*, kedudukannya dalam proses pengadilan pidana adalah sebagai alat bukti surat, sesuai dengan penegasan pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c KUHAP dan sebagai alat bukti keterangan ahli, sesuai dengan penegasan pasal 1 Stb. 1937-350 jo. Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

Bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

C. PENUTUP

Fungsi keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan sebagai alat bukti dalam proses pengadilan pidana diperlukan mulai dari proses pemeriksaan perkara, baik pada tahap pemeriksaan penyidikan maupun pada pemeriksaan disidang pengadilan sangat penting dan dibutuhkan, terutama untuk membantu penyidik, penuntut umum ataupun hakim dalam mengungkapkan suatu kasus pembunuhan yang sangat rumit, kompleks yang bersifat spesifik. Bantuan

ahli sudah dibutuhkan sejak awal pemeriksaan penyidikan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim pada saat pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk memberikan pendapatnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya untuk dapat membuktikan bahkan menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*” , Sinar Grafika. Jakarta

Edmund Makarim 2019, *Kompilasi Hukum Telematika, Divisi Buku Perguruan Tinggi*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Munir Fuady 2019, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya. Bandung

Harry Sasangka & Lily Rosita, 2018, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju. Bandung

Leden Marpaung, 2019, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika. Jakarta

Lamintang, 2019. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta. Bandung.

Mohammad Taufik Makarao& Suhasril, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 2017, *Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, CV. Mandar Maju. Bandung.

Moeljanto, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Moch Anwar, H.A.K, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sianturi, S. R, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHMPH, Jakarta.

Sudarsono, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Van Bemmelen J. M, 1950 *Strafvordering, Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht. 'S-Gravenhage : Martinus Nijhoft*